

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Thailand dan Kamboja merupakan dua negara yang memiliki hubungan baik. Hal ini karena kedua negara memiliki banyak kesamaan, seperti kesamaan sistem pemerintahan dan agama. Namun, hubungan baik ini menjadi tegang setelah Perang Indocina. Konflik perbatasan teritorial antara Thailand dan Kamboja merupakan fenomena internasional, terutama di Kuil Preah Vihear tempat terjadi pertikaian antara kedua negara. Isu kepemilikan Kuil Preah Vihear mulai muncul di Thailand saat Kamboja merdeka pada tahun 1953. Setelah Thailand mengirim pasukan ke kuil tersebut, hubungan kedua negara terganggu. Hubungan Thailand-Kamboja menjadi lebih buruk karena perselisihan tentang kepemilikan Kuil Preah Vihear. Kuil itu terletak di antara wilayah Choam Khsant provinsi Preah Vihear Kamboja dan wilayah Kantharalak provinsi Sisaket Thailand (Nurfadhilah, 2017).

Ketika Kamboja memperoleh kemerdekaannya di tahun 1953, Thailand menguatkan pertahanannya di kawasan kuil Preah Vihear dengan meletakkan pos polisi di pergunungan Dongrek. Hal ini tentu membuat Kamboja tidak senang, yang mana pada saat itu Kamboja sedang dipimpin oleh Perdana Menteri Sihanouk. Kemudian, beberapa negosiasi dilakukan oleh kedua negara. Negosiasi ini berjalan mulai dari 1953 hingga 1958, namun tidak juga mendapatkan hasil yang positif. Akhirnya, Kamboja memilih untuk membawa masalah ini kepada pihak ketiga yaitu International Court of Justice (ICJ) (Widia, 2018). Pada 15 Juni 1962, Mahkamah Internasional/ICJ menetapkan jika kuil Preah Vihear dimiliki oleh Kamboja. Sehingga, Thailand layak mengambil kembali pasukan militernya dan beberapa penjaga yang ditempatkan di daerah kuil atau di kawasan yang berada di bawah kedaulatan Kamboja (Mangku, 2011).

Menurut peta Perancis dan Siam (Thailand) tahun 1907, yang menunjukkan bahwa perbatasan itu dibentuk oleh garis air sepanjang Gunung Dongrek dan kuil Preah Vihear berada di ketinggian 525m di peta, jalan tersebut mengarah melalui daerah Kamboja. Menurut keterangan tersebut, ICJ memutuskan bahwa Kamboja berhak memiliki kuil Preah Vihear. Wujud respon dari keputusan Mahkamah Internasional tersebut, mantan Menteri Luar Negeri Thailand Thanat Khoman

memberikan surat kepada sekretaris jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang mengutarakan ketidakpuasannya mengenai hasil yang diberikan Mahkamah Internasional tersebut. Tetapi, sebagai bagian Perserikatan Bangsa-Bangsa, pemerintah memenuhi kewajiban yang timbul dari keputusan tersebut menurut Pasal 94 Piagam PBB (Chandra, 2016).

Kembali munculnya konflik wilayah antara Thailand dengan Kamboja diawali dengan pengesahan prasasti kuil Preah Vihear pada abad ke-11 oleh UNESCO PBB pada 8 Juli 2008. Thailand merasa dirugikan dengan pengesahan tersebut. Alasan Thailand merasa dirugikan dengan pengesahan tersebut karena sebelumnya ada wilayah disekitar kuil berukuran 4,6 km² belum bisa disahkan oleh *International Court of Justice* (ICJ), sehingga Thailand masih menganggap Kuil Preah Vihear berada di bawah kedaulatannya. Karena ketegangan yang terjadi di antara kedua negara, terjadi baku tembak antara tentara militer Thailand dan Kamboja. Ini dimulai dengan penangkapan tiga demonstran Thailand yang memasuki kuil Preah Vihear, yang merupakan wilayah yang dimiliki Kamboja. Pada saat baku tembak antara Thailand dengan Kamboja berlangsung, Thailand dipimpin oleh Abhisit Vejjajiva (Intan, 2022).

Konflik regional itu semakin intensif ketika Kamboja-Thailand yang berseteru memutuskan agar mengangkat senjata dan memberikan tentara ke daerah tersebut, hingga akhirnya menewaskan nyawa 3 tentara Kamboja, juga satu tentara Thailand. Pada tahun 2011, berlangsung baku tembak antara Kamboja dengan Thailand sampai kontak senjata menyebar ke area barat yang melampaui 153 km hingga di kuil Ta Moan dan Ta Krabey, yang akhirnya mendorong sekretaris jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Ban Ki-Mon, turut serta dan memerintahkan gencatan senjata antara kedua negara (Fadhillah, 2020, p. 180).

Konflik bersenjata di kawasan yang dipersengketakan ini telah menarik perhatian masyarakat internasional, khususnya ASEAN, sebuah organisasi internasional di Asia Tenggara yang memiliki seperangkat aturan dan tata cara pengambilan keputusan untuk menyelesaikan konflik antar negara anggotanya. Dalam konflik ini, ASEAN berperan sebagai mediator dan perantara antara dua negara yaitu Thailand dan Kamboja. Di masa lalu, negara-negara berusaha menyelesaikan perselisihan tersebut secara bilateral, namun tidak menemukan jalan

keluar. Sebagai negara ketiga, ASEAN bertujuan untuk mengurangi konflik di wilayah perbatasan (Nurfadhilah, 2017).

Awal mulanya, Thailand hendak menyudahi sengketa perbatasan ini dengan cara bilateral dan tidak menggunakan intervensi dari negara lain. Rencana untuk memasukkan Kuil Preah Vihear ke dalam daftar warisan dunia juga dimulai selama pemerintahan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra. Penandatanganan Komunike Bersama antara Thailand dan Kamboja dilakukan pada bulan Juni 2008 sebagai hasil dari kerja sama proaktif Thailand. Namun, konflik kembali terjadi antara kedua negara akibat oposisi nasionalis Thailand, yang menghasilkan penggunaan senjata dan kembalinya kedua negara ke Mahkamah Internasional (Duangratana, 2019).

Pada masa pemerintahan Abhisit, Abhisit melakukan pendekatan militeristik yaitu dengan menempatkan militernya di dekat perbatasan Thailand dan Kamboja untuk menyelesaikan konflik mengenai Kuil Preah Vihear yang terletak di perbatasan kedua Negara. Akibatnya, terjadi banyak kontak senjata dan korban jiwa di kedua Negara tersebut. Selain itu, ada hubungan antara Perdana Menteri dan birokrasinya, yang dapat mempengaruhi kebijakan Thailand terkait perbatasan dengan Kamboja (Putra, 2015).

Dalam menangani konflik perbatasan ini, PM Yingluck Shinawatra lebih menggunakan strategi terbaru untuk menyelesaikan Kuil Preah Vihear dengan melakukan mediasi dengan ASEAN dan pihak ketiga. Selain itu, Yingluck menyusun ulang kabinetnya untuk mendapatkan dukungan dalam penyelesaian Kuil tersebut dan untuk mempermudah urusan Negara yang dipimpinnya. Yingluck menjadikan ini sebagai cara mengambil hati masyarakat Thailand dan ingin mengembalikan dominasi partai kakaknya yaitu Thaksin (Putra, 2015).

Skripsi terdahulu yang berjudul “Perubahan Kebijakan Pemerintah Thailand dalam Penyelesaian Perebutan Kuil Preah Vihear dengan Kamboja Era Abhisit dan Yingluck Tahun 2008-2011” yang ditulis oleh Taufik Hendra Putra, menjelaskan perubahan dari kebijakan yang dilakukan Thailand disebabkan oleh pergantian Perdana Menteri. Sedangkan, dalam tulisan ini nantinya akan menambahkan fokus kepada konteks sosial yang berpengaruh terhadap pengambilan keputusan dari kedua Perdana Menteri. Tulisan ini juga akan menjelaskan apa yang berada dibalik pemikiran dari kedua Perdana Menteri Abhisit dan Yingluck.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah yang akan diangkat yaitu “Mengapa para pemimpin Thailand tersebut memiliki cara diplomasi yang berbeda?”

C. Tujuan Penelitian

Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan penyelesaian masalah dari 2 pemimpin yang berbeda. Hasil kebijakan luar negeri dari 2 kepemimpinan yang berbeda juga akan dipengaruhi oleh konteks sosial keduanya. Konflik antara Kamboja-Thailand disebabkan atas beberapa faktor yakni kepentingan nasional dari dua negara, kedaulatan masing-masing negara, dan sistem politik Thailand. Terjadinya konflik sengketa wilayah yang sampai saat ini belum juga usai membuat penulis tertarik untuk membahas kasus ini. Tulisan ini nantinya akan menggunakan teori idiosinkratik serta konsep diplomasi koersif dan diplomasi preventif.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka pemikiran adalah bagian dari penulisan yang membahas tentang teori atau konsep yang berkaitan dengan penelitian yang ditulis sehingga dapat tercipta kerangka penelitian yang baik darinya. Teori atau konsep yang digunakan juga membantu dalam penelitian untuk mendeskripsikan suatu fenomena, memecahkan masalah atau memahami masalah yang ada. Untuk menjelaskan latar belakang secara lebih rinci dan masuk ke dalam rumusan masalah yang didefinisikan.

Teori Idiosinkratik

Istilah kepribadian disebut “konstruksi” dalam bahasa metodologis. Sebab, makna yang diberikan pada istilah kepribadian diwujudkan dalam bentuk perilaku. Teori ini berfokus pada aspek atau ekspresi kepribadian yang membantu menjelaskan perilaku politik seorang pemimpin. Perilaku politik berasal dari sifat-sifat manusia yang sangat dasar, yang disebut kepribadian. Perilaku manusia tidak berasal dari pertimbangan tentang tujuan dan cara mencapai tujuan itu; lebih dari itu, ciri-ciri kepribadian si pelaku politik telah berkembang sejak kecil dan terus berlanjut sepanjang hidupnya (Mas'ood, 1990).

Ahli teori psikoanalitik berpendapat bahwa pengalaman awal kita dengan orang tua sangat memengaruhi bagaimana kita berkembang. Teori psikoanalisis Sigmund Freud (1856–1939) mengembangkan ciri-ciri tersebut. Freud adalah seorang dokter yang mengkhususkan diri dalam neurologi. Freud tinggal di Wina sebagian besar hidupnya, tetapi menjelang akhir karirnya, ia pindah ke London karena sikap Nazi yang anti Semit (Santrock, 2003).

Freud (1917) mengatakan bahwa ada 3 struktur di dalam kepribadian, yaitu id, ego dan superego. Id merupakan struktur dari Freud mengenai kepribadian yang berisi naluri, yang memiliki arti sumber energi psikis manusia. Menurut Freud, id tidak disadari sepenuhnya dan tidak memiliki hubungan dengan realitas. Ketika anak-anak menghadapi tuntutan dan hambatan realitas, muncullah struktur kepribadian baru: ego, struktur kepribadian yang dikemukakan oleh Freud yang membantu mereka memenuhi tuntutan realitas. Karena kemampuan ego untuk membuat keputusan rasional, ego disebut sebagai "cabang eksekutif" kepribadian. Ego dan ide tidak memiliki moralitas. Mereka tidak mempertimbangkan apakah sesuatu itu benar atau salah. Superego adalah struktur kepribadian dari Freud yang merupakan cabang moral dari kepribadian. Superego akan menimbang apakah sesuatu itu benar atau salah. "Hati Nurani" kita adalah istilah yang biasa kita gunakan untuk menggambarkan superego kita. Freud menggambarkan kepribadian sebagai gunung es: sebagian besar kepribadian kita berada di bawah permukaan kesadaran kita, seperti gunung es di bawah air (Santrock, 2003).

Pada tingkat pembuatan keputusan individu, aktor pembuat kebijakan memainkan peran yang sangat penting dalam penyusunan kebijakan luar negeri. Pada tingkat ini, jangkauan analisis cenderung lebih spesifik dan mikro, dan berfokus pada peran individu, seperti presiden atau kepala negara, sebagai pengambil keputusan dalam mencetuskan arah kebijakan luar negeri suatu negara. Menurut Rosenau, persepsi, kalkulasi, dan sikap pembuat kebijakan dapat dipengaruhi oleh nilai-nilai yang dipercayai, pengalaman, dan karakteristik individu pembuat kebijakan luar negerinya. Selain itu, variabel ini dikaitkan dengan sifat psikologis individu dan preferensi mereka untuk membuat keputusan, juga dikenal sebagai faktor idiosinkretik (ZUBAIDAH, 2019).

Faktor-faktor psikologis yang mempengaruhi para pemimpin negara ketika mereka menetapkan kebijakan luar negeri dikenal sebagai faktor idiosinkratik. Setiap orang memiliki cara tersendiri untuk mengambil keputusan, dan pemimpin memiliki cara tersendiri untuk membuat kebijakan tentang hal-hal yang menjadi prioritas. Nilai-nilai yang dia berikan ketika dia masih kecil dapat mempengaruhi cara dia bertindak di kemudian hari. menggunakan model analisis teori idiosinkratik, yaitu suatu model studi tentang orang-orang di mana karakter mempengaruhi keputusan mereka tentang kebijakan internasional (Cendana, 2020).

Faktor idiosinkratik pemimpin memiliki 4 komponen penentu. Pertama, latar belakang keluarga. Ini termasuk hubungan sosial dan ekonomi keluarga, status sosial, dan status sosial. Kedua, latar belakang pendidikan seorang pemimpin, yang mencakup pendidikan mereka dari sekolah dasar hingga jenjang tertinggi. Pada latar belakang pendidikan, pendidikan mengacu pada pendidikan formal dan informal. Ketiga, pengalaman dan pembelajaran yang dihasilkan dari kehidupan sosial seorang pemimpin. Keempat, afiliasi dengan pemimpin atau elit terjadi dalam sistem politik di mana partai politik berfungsi sebagai alat utama untuk demokrasi. Pandangan orang tentang elit sangat dipengaruhi oleh keyakinan dan kepentingan yang diusung oleh partai politik mereka (ZUBAIDAH, 2019).

Komponen terakhir dari faktor idiosinkratik yaitu, pemimpin dipengaruhi oleh produksi pengetahuannya. Produksi pengetahuan ini berhubungan dengan latar belakang pendidikan dan kehidupan sosial, dan nemun lebih spesifik pada bagaimana pemimpin menyerap pengetahuan menjadi persepsi, pola pikir, dan perspektif mereka tentang masalah. Misalnya, seorang presiden yang berasal dari latar belakang militer cenderung mengikuti perspektif militer saat memimpin bangsanya. Menteri luar negeri dari negara berkembang yang memperoleh pendidikan di Barat (Amerika dan Eropa) cenderung bekerja sama dengan negara-negara barat dan mengadopsi pandangan liberalis dan kapitalistik mereka dalam kebijakan politik, ekonomi, dan pertahanan dan keamanan. Latar belakang kehidupan seseorang akan membentuk persepsi mereka, yang membantu mereka membuat keputusan dalam berbagai situasi. Persepsi seseorang dipengaruhi oleh kecenderungan pribadinya, dorongan dalaman, pengalaman masa lalu, dan harapan (ZUBAIDAH, 2019).

Teori idiosinkratik dalam konteks sosial menekankan pada peran individu dalam pembuatan keputusan dan perilaku sosial. Dalam penelitian tentang sengketa perbatasan antara Thailand dan Kamboja terkait kuil Preah Vihear, individu seperti pemimpin politik dan diplomat dapat memainkan peran penting dalam pembuatan kebijakan luar negeri dan penyelesaian konflik. Dalam konteks ini, teori idiosinkratik dapat membantu dalam memahami bagaimana individu-individu tertentu mempengaruhi kebijakan luar negeri Thailand terkait sengketa perbatasan dengan Kamboja. Misalnya, ketika Abhisit Vejjajiva yang menggunakan kekuatan militer dalam kebijakan luar negerinya dalam penyelesaian konflik Kuil Preah Vihear. Kondisi ini disebabkan oleh individu atau kelompok tertentu, yaitu Partai Demokrat dan PAD (*People's Alliance of Democracy*) yang berisi tokoh nasionalis militan, pendukung raja dan kumpulan serikat buruh yang berkontribusi dalam pemerintahan Abhisit mengambil langkah kebijakan luar negerinya (Duangratana, 2019).

Pada masa kepemimpinan Yingluck Shinawatra, teori idiosinkratik relevan pada peristiwa ketika Yingluck menggunakan kebijakan luar negeri yang lebih lembut. Yingluck menggunakan kebijakan luar negeri yang lebih lembut dengan dilatarbelakangi oleh Yingluck yang merupakan adik dari Thaksin Shinawatra yaitu seorang yang pernah menjadi kepala pemerintah di Thailand. Yingluck berniat untuk mengembalikan partai kakaknya menjadi partai yang mendominasi Thailand. Faktor lain yang mempengaruhi Yingluck adalah Yingluck seorang pebisnis. Tanggung jawab sosial dan materialisme adalah dua standar pengambilan keputusan yang dipegang oleh pekerjaan ini (Duangratana, 2019, p. 68).

Konsep Diplomasi Koersif

Dalam diplomasi koersif, suatu negara melakukan upaya koersif tanpa menggunakan kekerasan atau kekuatan sepenuhnya negara lain. Secara umum, diplomasi koersif didefinisikan sebagai pemaksaan yang dilakukan oleh suatu negara dengan menggunakan ancaman, sanksi, atau bahkan kekerasan untuk mengubah sikap negara yang bersangkutan. Alexander L. George pertama kali memperkenalkan konsep diplomasi koersif dalam bukunya yang berjudul "*The Limits of Coercive Diplomacy*" pada tahun 1971. Konsep ini berasal dari diplomasi kekerasan yang diperkenalkan oleh Thomas C. Schelling dalam bukunya "*Arms and Influence*" pada tahun 1966, terutama dengan gagasan tentang paksaan (Paul Gordon Lauren, 2007).

Menurut Hedley Bull, diplomasi adalah hubungan antar negara yang dilakukan oleh agen resmi, yaitu pemerintah, untuk mencapai perdamaian. Dalam bukunya "*The Principle of Diplomacy*", KM Panikkar mengatakan bahwa diplomasi adalah seni mengutamakan kepentingan suatu negara dalam hubungannya dengan negara lain. Pada dasarnya, diplomasi adalah upaya untuk meyakinkan negara lain untuk menerima pandangan kita dan mendukungnya tanpa menggunakan kekerasan (Nur Wahida, 2023).

Ada dua jenis diplomasi: *soft diplomacy*, melibatkan pencapaian perdamaian di bidang budaya, bahasa, dan ekonomi; *hard diplomacy*, melibatkan agresi militer dan politik. Persuasif, kompromi, dan ancaman kekuatan senjata adalah strategi diplomasi yang digunakan. Kepentingan nasional, kebebasan politik, dan integritas teritorial adalah tujuan diplomasi setiap negara. Menurut Kautilya, tujuan utama diplomasi adalah untuk menjamin keuntungan maksimal bagi Negara sendiri, dan keamanan tampaknya merupakan kepentingan utama. Karena keduanya sangat kontradiktif, diplomasi sering juga disebut sebagai proses yang cenderung damai dan kooperatif, sementara koersif identik dengan paksaan, ancaman, dan bahkan kekerasan. Akibatnya, diplomasi dan paksaan sering ditempatkan pada akhir spektrum yang berbeda. Konsep ini, bagaimanapun, berlaku sebaliknya dalam kehidupan nyata (Nur Wahida, 2023).

Untuk meningkatkan kredibilitas ancaman, pemaksaan menggunakan kekerasan atau kekerasan terbatas namun efektif. George kemudian membuat rangka kerja teori baru yang lebih sistematis, "diplomasi koersif", yang merupakan penyempurnaan dari gagasan tentang *compellence*. George mengatakan bahwa diplomasi koersif memiliki dua tujuan utama: menghentikan atau membatalkan tindakan berbahaya yang telah dilakukan oleh negara. Dalam penerapannya, strategi diplomasi koersif versi George terdiri dari empat variabel: permintaan, wadah, atau mekanisme untuk membuat permintaan terasa urgen, seperti batas waktu, ancaman atau hukuman untuk ketidakpatuhan, dan penggunaan insentif (Nur Wahida, 2023).

Berangkat dari pemaparan mengenai diplomasi koersif diatas, kasus sengketa wilayah ini relevan dengan konsep diplomasi koersif dengan bukti bahwa Thailand yang melakukan kontak senjata ketika Kawasan Kuil Preah Vihear dinyatakan sebagai warisan dunia milik Kamboja. Thailand yang tidak menyetujui pengesahan

tersebut melakukan penyerangan sebagai wujud ketidaksetujuan tersebut. Penyerangan tersebut dimulai dengan 3 orang demonstran yang menyusup ke dalam Kawasan kuil (Rezky Ramadhan Antuli, 2019).

Konsep Diplomasi Preventif

Sekretaris Jenderal PBB Dag Hammarskjöld, yang bertugas dari tahun 1953 hingga 1961, adalah orang yang mengusulkan istilah "diplomasi preventif". Sejak itu, konsep ini terus berkembang sebagai tanggapan terhadap masalah baru. Dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa, diplomasi preventif dianggap sebagai bagian penting dari upaya pencegahan konflik yang lebih luas. Ini terutama mengacu pada tindakan awal diplomasi yang bertujuan untuk mencegah perselisihan baru dan peningkatan ketegangan berkembang menjadi kekerasan, serta menghentikan penyebaran konflik yang terus berlanjut. Namun, karena situasi Perang Dingin, alat diplomasi preventif tidak dapat digunakan secara efektif. Setelah Perang Dingin berakhir, PBB memiliki peluang baru untuk meningkatkan fungsinya dalam mencegah konflik. Dengan penerbitan "An Agenda for Peace" pada tahun 1992, inisiatif Sekretaris Jenderal PBB Boutros Boutros-Ghali menghidupkan kembali gagasan diplomasi preventif (Jenča, 2013).

Konvensi umum PBB tahun 1992 menyatakan bahwa diplomasi preventif bertujuan untuk mencegah perbedaan pendapat di antara pihak-pihak yang bersangkutan, mencegah perselisihan yang timbul berkembang menjadi konflik, dan menghentikan penyebaran konflik saat sudah terjadi. Konflik berbeda dari perselisihan karena konflik yang lebih kompleks dan akhirnya lebih sulit diselesaikan. Sedangkan, perselisihan biasanya lebih mudah diakhiri. Konflik terkadang berujung pada kekerasan. Dalam satu konflik, beberapa masalah juga dapat muncul. Sejak pertengahan tahun 1970-an, organisasi internasional seperti PBB dan organisasi regional seperti Uni Eropa dan ASEAN telah menggunakan diplomasi preventif untuk mengatasi konflik antarnegara. Langkah-langkahnya meliputi pencarian fakta operasi, pengembangan sistem peringatan dini, penyebaran pasukan penjaga perdamaian untuk mencegah konflik, dan atau perebutan zona demiliterisasi antara pihak yang bertikai (Ginting, 2019).

Jika dilakukan secara bersamaan dan dengan dukungan semua anggota, keempat bidang tindakan ini berkontribusi pada perdamaian. PBB memiliki

pengalaman yang luas tidak hanya di bidang ini, tetapi juga di ranah kerja perdamaian yang lebih luas di mana keempat bidang ini berkembang. Untuk menciptakan dunia yang damai, telah dilakukan banyak hal, termasuk dekolonisasi, pembangunan lingkungan dan berkelanjutan, populasi, perlunya senjata, peningkatan hukum internasional, dan pemberantasan penyakit. Selama bertahun-tahun, dunia telah dipenuhi dengan konflik dan gangguan yang disebabkan oleh penderitaan manusia yang besar dan perampasan. Namun, tanpa upaya nasional yang berkelanjutan, kita akan jauh lebih dari itu. Pengalaman luas ini harus dipertimbangkan saat menilai kemampuan organisasi internasional dan regional dalam menjaga keamanan internasional, baik dalam pengertian konvensional maupun dalam perspektif yang akan datang (Ginting, 2019).

Diplomasi preventif berusaha menyelesaikan kegagalan sebelum kekerasan muncul. Untuk mengakhiri konflik dan menjaga perdamaian setelah konflik berakhir, perdamaian harus diciptakan dan dijaga. Jika ini berhasil, mereka memperkuat peluang untuk membangun perdamaian pasca konflik, yang dapat mencegah terulangnya kekerasan antara bangsa dan rakyatnya. Diplomasi preventif ini dapat dikaitkan pada saat masa pemerintahan Yingluck (Ginting, 2019).

E. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan kerangka konseptual yang telah dibuat, maka hipotesis penelitian ini ialah:

- Diplomasi koersif yang dipilih oleh Abhisit dipengaruhi oleh elit militer dan bisnis yang berada di PAD (kelompok Kaos Kuning).
- Diplomasi preventif yang dipilih oleh Yingluck dipengaruhi oleh latar belakang keluarga dan Pendidikan.

F. Jangkauan Penelitian

Penelitian ini akan melihat pengaruh dari konteks sosial pemimpin-pemimpin Thailand dalam memutuskan kebijakan luar negerinya. Pada penelitian ini akan berkiblat pada referensi kejadian ditahun 2008-2011, dimana pada tahun tersebut berbagai jenis diplomasi terlaksana dan mempengaruhi pengambilan keputusan pemimpin-pemimpin Thailand.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode kualitatif dengan memakai sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan literature review, dimana sumber datanya adalah jurnal, buku, artikel berita, website, dan dokumen terkait penelitian lainnya. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif yaitu mengumpulkan data dan fakta kemudian mengkajinya berdasarkan kerangka teori yang disusun secara sistematis untuk mendapatkan korelasi antara satu fakta dengan fakta lainnya. Selain itu, penulis menggunakan pendekatan ini untuk memahami secara menyeluruh kejadian dalam konteks fokus masalah yang diteliti.

H. Sistematika Penulisan

Bab I: Pendahuluan

Pada bab ini, penulis akan menjelaskan akar permasalahan melalui latar belakang, dan menyertakan rumusan masalah, kerangka teoritik, tujuan penelitian, hipotesa, jangkauan penelitian, juga sistematika penulisan.

Bab II: Diplomasi Abhisit dan Yingluck dalam Konflik Kuil Preah Vihear

Pada bab ini, mengenai sejarah kuil Preah Vihear. Mulai dari awal mula konflik terjadi hingga pihak-pihak ketiga yang terlibat dalam meredakan konflik sengketa wilayah kuil Preah Vihear. Bab ini juga akan menjelaskan diplomasi atau kebijakan luar negeri yang akan dilaksanakan oleh Perdana Menteri Abhisit Vejjajiva dan Yingluck Shinawatra.

Bab III: Konteks Sosial yang Berpengaruh terhadap Pengambilan Keputusan Abhisit dan Yingluck

Pada bab ini, penulis akan menjelaskan bagaimana perilaku pemimpin Thailand dibentuk dan akan menjelaskan bagaimana pemimpin Thailand berdiplomasi.

Bab IV: Kesimpulan

Pada bab ini, penulis akan menyimpulkan dari konteks sosial dari latar belakang Perdana Menteri Abhisit Vejjajiva dan Yingluck Shinawatra dalam mendapatkan keputusannya untuk menetapkan kebijakan luar negerinya.